

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang beresiko tinggi terjadi bencana alam jika dilihat dari geografisnya. *United Nations Development Programme* menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masuk ke dalam jalur *Ring of Fire*. Jalur *Ring of Fire* atau biasa disebut juga dengan cincin api pasifik adalah jalur pegunungan aktif yang mempertemukan 3 lempengan, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia dan juga lempeng Indo-Asia. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi, baik itu gempa bumi vulkanik maupun tektonik (Togatorop:2016). Ketika bencana alam ini terjadi, maka kerugian pun akan diterima, baik itu secara materil maupun nonmaterial. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana alam ini, pengetahuan yang cukup sangat dibutuhkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dilewati oleh deretan gunung berapi, hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Saptadi (2012). BPBD DIY menyebut bahwa DIY memiliki banyak ancaman dan potensi bencana yang beraneka ragam, antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang pasang dan masih banyak lagi. Bencana utama yang mengancam Yogyakarta adalah letusan gunung berapi. Salah satu gunung berapi aktif yang selalu mengancam kehidupan warga Yogyakarta adalah Gunung Merapi. Dengan keadaan yang seperti itu, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Yogyakarta belum siap menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana menjelaskan bahwa bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengganggu serta mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam dan/atau non alam sehingga berdampak pada munculnya kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis dan juga kerugian harta benda. Selain itu, dikatakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 definisi dari Penanggulangan Bencana, yaitu cara untuk mengurangi dampak yang sangat merugikan dari sebuah ancaman bencana, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu rehabilitasi, pencegahan bencana serta tanggap darurat.

Kabupaten Sleman sebagaimana berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, terdapat kawasan lereng Gunung Merapi, dimana kawasan ini meliputi Tempel, Pakem, Turi dan juga Cangkringan hingga puncak Gunung Merapi (Wirakusuma:2016). Berdasarkan letak geografis inilah melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 3 zona wilayah yaitu: Kawasan Rawan Bencana Merapi III, Kawasan Rawan Bencana Merapi II, dan Kawasan Rawan Bencana Merapi I. Kawasan Rawan Bencana Merapi III meliputi daerah Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak. Kawasan Rawan Bencana Merapi II meliputi Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak. Kawasan terakhir yaitu Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan dan Berbah termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Merapi I.

Kecamatan Tempel yang menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman, berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi termasuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana Merapi II. Letak Kecamatan Tempel yang termasuk kedalam jalur kawasan lereng Gunung Merapi, banyaknya sumberdaya air dan potensi ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya, membuat kawasan ini sangat berpeluang

sebagai jalur yang terkena lahar dingin Gunung Merapi (Nugroho:2014). Atas sebab inilah yang menjadi perhatian bagi BPBD Kabupaten Sleman dalam hal penanggulangan bencana

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan Desa Tangguh Bencana melalui BPBD Kabupaten Sleman. Desa Tangguh Bencana sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012 merupakan sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Desa Pondokrejo adalah salah satu wilayah yang memiliki ancaman bencana di Kabupaten Sleman. Topografi Desa Pondokrejo yang dilalui oleh jalur Gunung Merapi, membuat desa ini menjadi terkena ancaman bencana lahar dingin. Dari sinilah, Desa Pondokrejo berdasarkan BPBD Sleman termasuk dalam daerah yang memiliki ancaman potensi bencana yang tinggi sehingga membahayakan keselamatan masyarakat. Terdapatnya sungai Krasak yang merupakan sungai yang dilalui oleh lahar dingin Gunung Merapi, mengakibatkan 5 padukuhan rentan terhadap dampak bencana yaitu Ngentak, Jlopo, Jlapan, Plotengan dan Watupecah.

Desa Tangguh Bencana di Desa Pondokrejo menurut berita yang dirilis dari [Harianjogja.com](http://Harianjogja.com) pada tanggal 26 Maret 2017 telah berjalan selama 1 tahun dihitung sejak diresmikan oleh BPBD Sleman pada bulan Maret 2017. Berbagai pandangan dan penilaian masyarakat tentu saja diperlukan dalam pengimplementasian program Destana ini. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan program ini, maka diperlukan

penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap program Destana. Berdasarkan latar belakang inilah, muncul sebuah gagasan untuk meneliti tentang Persepsi masyarakat terhadap program Destana di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel Sleman Tahun 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Tahun 2017 ?

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Tahun 2017

## **1.4 Manfaat**

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Selanjutnya penelitian ini dapat menjelaskan atas keraguan-keraguan teori yang bermunculan terhadap kegiatan tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pondokrejo, dan memberikan informasi baru mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Serta menambah pengetahuan mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Sleman dan konsep implementasi kebijakan, khususnya Program Desa Tangguh Bencana di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

Skripsi karya Munita Yeni Wirawati yang berjudul “Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Meyiapkan Kecakapan Hidup Masyarakat Untuk Menghadapi Bencana Di Desa Srimulyo Piyungan Bantul DIY” menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan pelaksanaan program, mendeskripsikan kecakapan hidup yang diperoleh peserta dalam pelaksanaan program, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Desa Tangguh Bencana. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana BPBD DIY di Desa Srimulyo dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi, program Desa Tangguh Bencana berpengaruh terhadap kacakapan hidup yang diperoleh peserta, faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencanan BPBD DIY di desa Srimulyo yaitu Desa Srimulyo sudah memiliki FPRB, peserta kompak dan solid dalam mengikuti pelaksanaan progam khususnya dalam kegiatan gladi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu tidak semua peserta mampu untuk diajak berfikir, fasilitasi

dari pendamping khususnya dari LSM kurang memuaskan peserta, teknik evaluasi yang di gunakan belum disusun secara sistematis, serta skop pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana terlalu luas. Dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana proses manajemen dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana.

Skripsi karya Miftakhul Munir yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulisan skripsi ini membahas mengenai bahan evaluasi apakah telah mencapai tujuan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan masyarakat sebagai actor utama yang siap dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu – waktu terjadi. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat lebih mengerti akan peran dan tanggung jawab terhadap bencana, Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bencana dan dapat mengurangi risiko, berjalannya relawan Desa Tangguh Bencana diharapkan dapat di dukung oleh berbagai pihak, dan di dukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai guna lancarnya upaya pengurangan risiko bencana, karena upaya menuju Desa Tangguh Bencana yang selalu siaga dan aman membutuhkan waktu dan ruang.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu tentang program Desa Tangguh Bencana**

Nama Penulis	Judul	Temuan
Munita Yeni Wirawat	Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Meyiapkan Kecakapan Hidup Masyarakat Untuk	Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana BPBD DIY di Desa Srimulyo dilakukan dengan tahapan

	Menghadapi Bencana Di Desa Srimulyo Piyungan Bantul DIY	perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi, program Desa Tangguh Bencana berpengaruh terhadap kacakapan hidup yang diperoleh peserta,
Miftakhul Munir	Evaluasi Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016	Masyarakat lebih mengerti akan peran dan tanggung jawab terhadap bencana, Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bencana dan dapat mengurangi risiko, berjalannya relawan Desa Tangguh Bencana diharapkan dapat di dukung oleh berbagai pihak, dan di dukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai.

*Sumber : diolah dari berbagai sumber.*

Berdasarkan tabel di atas memberikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan perbedaan, seperti : penelitian oleh Munita Yeni Wirawat memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana BPBD DIY di Desa Srimulyo dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi, program Desa Tangguh Bencana berpengaruh terhadap kacakapan hidup yang diperoleh peserta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Munir memberikan pemahaman bahwa masyarakat lebih mengerti akan peran dan tanggung jawab terhadap bencana, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bencana dan dapat mengurangi risiko, berjalannya relawan Desa Tangguh Bencana diharapkan dapat di dukung oleh berbagai pihak, dan di dukung dengan adanya fasilitas peralatan dan anggaran yang memadai.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Persepsi**

Persepsi adalah suatu pandangan seseorang terhadap suatu objek atau suatu hal, sehingga menghasilkan suatu pandangan dalam diri sebuah individu, yang mana setiap individu memiliki perbedaan dalam sudut pandang dalam pandangan suatu objek atau suatu hal tersebut. Dengan kata lain persepsi merupakan bagaimana pola pikir atau pandangan suatu individu dalam memahami, menghayati, meneliti dan fenomena tertentu. Persepsi adalah stimulus melalui indera diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadarinya. Dalam persepsi, sekalipun stimulusnya sama tapi karena pengalaman tidak sama, maka ada kemungkinan hasil persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya tidak sama keadaan tersebut menjelaskan bahwa persepsi itu bersifat individual.

Menurut Philip Kotler (dalam Muhadjir:2013), persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakarakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

Walgito (dalam Kusnandi:2007) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek utama dari persepsi, yaitu :

1. Aspek Kognitif menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan cara berpikir/mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.
2. Aspek Afeksi menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang.

3. Aspek Konatif/Psikomotor menyangkut motivasi, perilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Pengaruh persepsi seperti yang telah dikemukakan, persepsi dipengaruhi oleh faktor psikologis, termasuk asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu atau dapat dikatakan pengalaman yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar, harapan-harapan budaya, motivasi (kebutuhan), dan suasana hati (mood). Sejumlah percobaan telah menunjukkan pengaruh faktor-faktor tersebut pada persepsi.

### **1.6.2 Masyarakat**

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian Masyarakat yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007:30) yaitu kata masyarakat berasal dari *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Menurut Maclver dan Page (dalam Sukanto: 2009), masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenangdan kerjasama antara berbagai kelompok dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Auguste Comte (dalam Abdulsyani: 2007), masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak sosial.

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama

dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu keatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota. Menurut Soeryono Sokanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu :

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Sani (2007:32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

### **1.6.3 Bencana**

Menurut *United Nations Development Programme* (dalam Febri:2017), bencana merupakan suatu gangguan yang cukup serius bagi masyarakat karena menimbulkan kerugian terhadap manusia, material serta lingkungan, yang akibatnya melebihi kemampuan masyarakat korban tertimpa bencana, dan dalam penanggulangannya hanya berasal dari sumber daya masyarakat itu sendiri. Klasifikasi bencana dibedakan berdasarkan cepat lambatnya serangan bencana atau berdasarkan penyebab dari terjadinya bencana.

Menurut Priambodo (2013), bencana merupakan sebuah kejadian alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia ataupun gabungan dari keduanya yang terjadi secara

mendadak sehingga berdampak negatif untuk kehidupan makhluk hidup. Bencana adalah suatu peristiwa, entah karena perbuatan manusia atau alam, mendadak atau berangsur yang menyebabkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa melebihi kemampuan dari masyarakat korban untuk menanggulangi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri (Nasution:2005). Senada dengan definisi tersebut dijelaskan oleh Surono (2003) bencana adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan atau manusia yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang penanggulangan bencana, bencana dapat diuraikan menjadi beberapa jenis. *Pertama*, bencana alam. Bencana alam adalah segala sesuatu yang sumber, perilaku penyebab dan faktor serta pengaruhnya dari alam, seperti: banjir, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tsunami, angin topan, badai, kekeringan, tanah longsor. *Kedua*, bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. *Ketiga*, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa manusia, seperti konflik sosial antar kelompok dan komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Kusumasari (2014) penanggulangan bencana meliputi 5 tahapan umum:

1. Tahap pertama, *Prediction* (prediksi): dalam tahap ini kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan. Namun terlebih dulu langkah-langkah non-struktural diambil untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak bahaya bencana. Termasuk di sini adalah dikeluarkannya peringatan dini yang tepat waktu dan efektif serta evakuasi sementara masyarakat dan properti dari lokasi yang terancam bencana.

2. Tahap kedua, *Warning* (peringatan): tahap ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang teridentifikasi. Lewat lembaga-lembaga ini, individu dimungkinkan untuk menghadapi bahaya dengan mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko yang mereka hadapi serta mempersiapkan respons yang efektif.
3. Tahap ketiga, *Emergency relief* (bantuan darurat): tahap ini merujuk pada penyediaan bantuan atau intervensi selama atau setelah bencana terjadi. Ini merupakan bantuan keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terkena dampak bencana. Hal ini dapat dilakukan segera dan dalam jangka waktu singkat atau durasi yang lama.
4. Tahap keempat, *Rehabilitation* (rehabilitasi): tahap ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang terkena bencana seperti kondisi sebelum bencana terjadi. Di samping itu, juga digiatkan kembali dan difasilitasi semua penyesuaian yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko bencana.
5. Tahap kelima, *Reconstruction* (rekonstruksi): tahap ini merujuk pada pembangunan kembali kondisi kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Penanggulangan bencana terdapat 4 aktifitas siklus yang sangat penting dilakukan yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Alexander; Coppola; King; Moe & Pathranarakul; Quarantelli dalam Kusumasari, 2014:21):

### **1. Mitigasi**

Menurut David King (dalam Kusumasari:2014) mitigasi bencana diartikan sebagai suatu langkah yang diambil ketika bencana belum terjadi yang bertujuan mengurangi dampak dari terjadinya bencana terhadap masyarakat dan juga di

lingkungan sekitar. Mitigasi bencana dibagi menjadi 2, yaitu mitigasi non struktural dan mitigasi struktural. Mitigasi non-struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Di dalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik nonstruktural, modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan, dan kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat, konstruksi pembatas atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem (Coppola dalam Kusumasari:2014).

## **2. Kesiapsiagaan**

Kesiapsiagaan menurut Carter (dalam Cholid:2017) adalah suatu tindakan yang diharapkan mampu ditanggapi oleh masyarakat, pemerintah, organisasi, individu maupun komunitas atas terjadinya bencana secara cepat dan tepat. Adapun yang termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil. Kesiapsiagaan merupakan suatu antisipasi yang dilaksanakan guna meminimalisir korban jiwa, kerugian harta benda serta berubahnya kehidupan masyarakat. Sebaiknya, sebuah kabupaten maupun kota melakukan antisipasi melalui kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga merupakan wujud dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik secara kelompok maupun individu. Kesiapsiagaan juga merupakan bagian dari manajemen bencana secara terpadu.

Menurut Pribadi (2008), kesiapsiagaan adalah tindakan yang terlaksana dalam bentuk suatu antisipasi bencana guna memastikan bahwa tindakan yang terlaksana tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan tepat saat terjadi maupun setelah bencana. Kesiapsiagaan adalah seluruh kegiatan sebelum suatu bencana terjadi yang bertujuan dalam pengembangan kapasitas operasional serta memfasilitasi respon efektif ketika terjadinya bencana. Adapun terjadinya perubahan pandangan terhadap penanggulangan bencana yaitu tidak adanya pemikiran bahwa penanggulangan bencana adalah suatu aksi saat situasi tanggap darurat melainkan lebih memprioritaskan pada tahap prabencana yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak bencana. Sehingga semua aktivitas dalam cakupan pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum yaitu meliputi: kemampuan menilai resiko, perencanaan siaga, mobilisasi sumber daya, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, manajemen informasi, serta gladi atau simulasi.

Tujuan dari konsep kesiapsiagaan bencana yaitu meyakinkan sistem untuk bencana ini berkecukupan dan memadai, sumber daya dan prosedur berada tepat di tempat kejadian, dan dapat meringankan mereka yang tertimpa bencana, serta memungkinkan mereka untuk menolong diri sendiri. Selain itu kesiapsiagaan bencana diharapkan dapat meminimalisir dampak merugikan melalui tindakan berjaga-jaga yang efektif dan sebagai jaminan secara efisien dan tepat. ( Kusumasari: 2014)

### **3. Respons/ Daya Tanggap:**

Respons adalah tindakan yang dilakukan segera, sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Fungsi respons tidak hanya untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan, tetapi juga mencakup sistem yang dikembangkan untuk mengkoordinasikan dan mendukung upaya-upaya tersebut.

Respons juga termasuk menghidupkan kembali infrastruktur-infrastruktur penting dengan sangat cepat, misalnya membuka kembali jalur transportasi, pemulihan jaringan komunikasi dan listrik, serta juga memastikan pendistribusian makanan dan air bersih (Djunaedi:2016).

#### **4. Pemulihan**

Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana. Proses pemulihan dapat dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan segera setelah peristiwa bencana terjadi dengan tujuan menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak. Kegiatan ini meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, distribusi makanan dan air, serta pemulihan infrastruktur penting. Sedangkan kegiatan pemulihan jangka panjang tidak dimulai sampai fase darurat bencana berakhir, yaitu di saat masyarakat mulai merehabilitasi dan membangun kembali. Jenis-jenis pemulihan meliputi bantuan publik, pemulihan perumahan, dan pemulihan budaya. (Munir:2017).

#### **1.6.4 Desa Tangguh Bencana**

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun pengertian dari Desa Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No 1 Tahun 2012 adalah sebuah desa ataupun kelurahan yang berkemampuan mengetahui ancaman yang akan terjadi di daerahnya serta mampu mengkoordinir sumber

daya khususnya masyarakat guna meminimalisir kerentanan dan memaksimalkan kapasitas untuk pengurangan resiko bencana.

Dapat disimpulkan bahwa Desa Tangguh Bencana adalah desa atau kelurahan yang berkemampuan mandiri dalam hal beradaptasi dan juga mampu menghadapi potensi adanya ancaman bencana, serta mampu untuk memulihkan diri dengan cepat atas dampak dari bencana yang merugikan.

Tujuan program Desa Tangguh Bencana yaitu (Rahman:2017):

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana.
5. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana (PRB) antara lain: pihak daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli

Komponen-komponen Desa Tangguh Bencana (Destana) berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 antara lain:

1. Legislasi

Merupakan kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa.

## 2. Perencanaan

Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas.

## 3. Kelembagaan

Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.

## 4. Pendanaan

Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).

## 5. Pengembangan kapasitas

Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana

## 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut (Alifa dan Wibowo:2015) :

1. Bencana adalah urusan bersama.

Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Maka dari itu diperlukan kesiapsiagaan dari berbagai pihak.

2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko, upaya sistematis dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

3. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.

Masyarakat berperan penting dalam seluruh proses pengembangan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, diluar dari dukungan pihak luar.

4. Dilakukan Secara Partisipatoris.

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.

5. Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara

penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

6. **Transparansi dan Akuntabilitas.**

Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

7. **Kemitraan.**

Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).

## **1.7 Definisi Konsep**

1. Persepsi adalah suatu pandangan seseorang terhadap suatu objek atau suatu hal, sehingga menghasilkan suatu pandangan dalam diri sebuah individu, yang mana setiap individu memiliki perbedaan dalam sudut pandang dalam pandangan suatu objek atau suatu hal tersebut. Persepsi masyarakat dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : kognitif, afektif dan konatif.
2. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak sosial.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Empat (4)

aktifitas siklus dalam penanggulangan bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

4. Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman yang terjadi di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Desa Tangguh Bencana diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadap.

## **1.8 Definisi Operasional**

### **1.8 Definisi Operasional**

#### 1. Komponen Kognitif (pengetahuan)

- a. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan program Desa Tangguh Bencana
- b. Pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya pembentukan program Desa Tangguh Bencana
- c. Pengetahuan tentang adanya lembaga/kelompok siaga bencana di Desa Pondokrejo
- d. Pengetahuan tentang adanya FPRB
- e. Pengetahuan tentang adanya jalur evakuasi
- f. Pengetahuan tentang adanya barak pengungsian
- g. Kemudahan akses informasi terkait program Desa Tangguh Bencana

#### 2. Komponen Afektif (sikap)

- a. Rasa ingin untuk berpartisipasi dalam program Desa Tangguh Bencana
- b. Komitmen untuk mampu berpartisipasi dalam program Destana
- c. Keyakinan masyarakat Desa Pondokrejo terhadap pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana

- d. Rasa senang dan tidak senang masyarakat Desa Pondokrejo terhadap program Desa Tangguh Bencana
- e. Kesadaran akan keamanan kondisi tempat tinggal
- f. Kepentingan dalam menyimpan dokumen penting

### 3. Komponen Konatif (perilaku)

- a. Keaktifan mengikuti rapat koordinasi sebagai bagian dari kegiatan program Desa Tangguh Bencana
- b. Keaktifan mengikuti sosialisasi sebagai bagian dari kegiatan program Desa Tangguh Bencana
- c. Keaktifan mengikuti lembaga/ kelompok siaga bencana sebagai bagian dari kegiatan program Desa Tangguh Bencana
- d. Strategi mata pencaharian alternatif setelah adanya program Destana
- e. Keaktifan dalam berpartisipasi di FPRB
- f. Keikutsertaan dalam membuat jalur evakuasi.
- g. Tindakan yang dilakukan ketika terjadi bencana seperti: menuju titik kumpul sementara maupun titik aman, mendistribusikan logistik, melakukan pengamanan terhadap harta benda, serta melakukan patroli keamanan.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berspesifik pada sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan design penelitian. Menurut Sugiono (2012), metode kuantitatif diartikan metode penelitian yang berdasar pada filsafat *positivisme*,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### **1.9.2 Lokasi penelitian**

Dalam pengembangan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana), lokasi penelitian yang diambil yaitu Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.

### **1.9.3 Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel**

#### **1.9.3.1 Populasi**

Menurut Bungin dalam skripsi Agisni (2013: 38) populasi adalah dari bahasa Inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk. Menurut Usman dan Setiady dalam skripsi Agisni (2013: 38) populasi adalah semua nilai baik dari perhitungan maupun pengukuran dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Pondokrejo. Dengan total populasi sebesar 1.800 jiwa (lihat tabel 1.1 di bawah ini) :

**Tabel 1.2**  
**Populasi seluruh masyarakat Desa Pondokrejo**

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Ngentak	179

2	Plotengan	237
3	Jlopo	140
4	Karanglo	125
5	Dukuh	176
6	Jlapan	287
7	Banjarharjo	174
8	Glagahombo	204
9	Watupecah	281
<b>TOTAL</b>		<b>1.800</b>

Sumber: *Bagian Pemerintahan Desa Pondokrejo Tahun 2017*

### 1.9.3.2 Sampel

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008: 155) sampel adalah satu contoh yang diambil dari populasi. Maka dalam menentukan banyak sampel penelitian terhadap populasi digunakan rumus Yamane yang dikutip oleh Rakhmat dalam skripsi Apriyanto (2007: 39) dengan rumus sebagai berikut:

**Rumus 1.1**  
**Penentuan sampel rumus Yamane**

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Sumber : Apriyanto(2007)

Keterangan :

n : banyaknya unit sampel

N : banyaknya populasi

$d^2$  : tarif nyata 0,10 (catatan: umumnya digunakan 0,01, atau 0,05 dan 0,10. Tarif nyata dapat dipilih oleh peneliti)

1 : bilangan konstanta

Berdasarkan rumus tersebut, akan diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{1.800}{1.800 \cdot 0,10^2 + 1} = 94,73$$

Sampel ( $n= 95$  Orang)

Menurut Rahmat (1997: 82) langkah yang selanjutnya adalah menentukan sampel berkelompok, dari 95 sampel yang telah didapat, yaitu dengan menggunakan rumus penentuan sampel agar sampel lebih proporsional. Teknik pengambilan sampel dengan *stratified random sampling* yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel yang apabila populasi mempunyai anggota atau unsur heterogen dan berstrata proposional (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan rumus pengambilan sampel kelompok diatas maka sampel kelompok dalam penelitian ini adalah:

**Rumus 1.2**  
**Penentuan Sampel Kelompok**

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

Ni = Jumlah populasi dari masing-masing kelompok

N = Jumlah keseluruhan populasi

n = Jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang yang di turunkan dari distribusi 9 (sembilan) kelompok masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya, yang dapat dilihat dibawah ini:

a. Masyarakat Dukuh Ngentak :

$$ni = \frac{179}{1800} \times 95 = 9,44 \text{ dibulatkan menjadi } 9$$

b. Masyarakat Dukuh Plotengan :

$$ni = \frac{237}{1800} \times 95 = 12,50 \text{ dibulatkan menjadi } 13$$

c. Masyarakat Dukuh Jlopo :

$$ni = \frac{140}{1800} \times 95 = 7,38 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

d. Masyarakat Dukuh Karanglo :

$$ni = \frac{125}{1800} \times 95 = 6,59 \text{ dibulatkan menjadi } 7$$

a. Masyarakat Dukuh Dukuh :

$$ni = \frac{176}{1800} \times 95 = 9,28 \text{ dibulatkan menjadi } 9$$

b. Masyarakat Dukuh Jlapan :

$$ni = \frac{287}{1800} \times 95 = 15,14 \text{ dibulatkan menjadi } 15$$

c. Masyarakat Dukuh Banjarharjo :

$$ni = \frac{174}{1800} \times 95 = 9,18 \text{ dibulatkan menjadi } 9$$

d. Masyarakat Dukuh Glagahombo :

$$ni = \frac{204}{1800} \times 95 = 10,76 \text{ dibulatkan menjadi } 11$$

e. Masyarakat Dukuh Watupecah :

$$ni = \frac{281}{1800} \times 95 = 14,83 \text{ dibulatkan menjadi } 15$$

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang yang di turunkan dari 5 (lima) kelompok masyarakat, yang dapat dilihat pada tabel

1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Sampel Penelitian**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk Terdampak
1	Ngentak	9
2	Plotengan	13
3	Jlopo	7
4	Karanglo	7

5	Dukuh	9
6	Jlapan	15
7	Banjarharjo	9
8	Glagahombo	11
9	Watupecah	15
TOTAL		95

*Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2018*

Dalam pengampilan sampel responden di masing-masing padukuhan, digunakanlah Ms. Excel untuk pengolahan jumlah penduduk di tiap padukuhan secara acak sesuai dengan jumlah sampel di setiap padukuhan.

#### **1.9.4 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena :

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, karena akan mudah mendapatkan informasi yang berkaitan atau relevan dengan penelitian. menurut Arikunto (2002) wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”. Adapun kriteria pengambilan narasumber dalam penelitian ini yaitu berdasarkan subjek yang terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran maupun perhatian penelitian, dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan.

##### **b. Kuisisioner**

Menurut Sugiyono (2013) kuisisioner adalah sala satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan secara tertulis kepada responden. Dalam pelaksanaannya, terjun langsung kelapangan perlu dilakukan untuk mendapat data yang diinginkan karena melalui metode ini memerlukan kontak langsung antara responden dengan peneliti. Kuisisioner yang disebarkan berfokus pada masyarakat Desa Pondokrejo sebagai penerima program Desa Tangguh Bencana. Adapun skala yang digunakan dalam kuisisioner ini yaitu skala likert. Menurut Sugiyono (2012:93) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam menjawab skala likert ini, responden hanya memberi tanda, misalnya *checklist* atau tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai pernyataan. Kuisisioner yang telah diisi responden perlu dilakukan penyekoran. Berikut ini bobot penilaian pada skala Likert.

**Tabel 1.4**  
**Bobot Penilaian**

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : *Sugiyono (2012)*

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah pengumpulan data dengan mengamati atau menganalisis data yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain terkait suatu subjek. Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa dokumen adalah sejumlah data dan fakta yang

tersimpan dalam wadah yang berwujud dokumentasi. Hampir sejumlah data yang ada adalah berwujud surat-surat, laporan, dan sebagainya. Hal mendasar dari data ini tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di era sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan mengutip data dokumen-dokumen yang dimiliki oleh petugas di Pemerintah Desa Pondokrejo terkait dengan program Desa Tangguh Bencana.

### **1.9.5 Jenis data**

Dalam melakukan penelitian suatu objek, memerlukan data sebanyak mungkin. Karena data memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penelitian tersebut. Data yang terkait penelitian sangat banyak dan luas.

#### **a. Data primer**

Menurut Sugiyono (2000) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pondokrejo, serta kuisioner yang disebarkan kepada Masyarakat Desa Pondokrejo sebagai penerima program Desa Tangguh Bencana sehingga berkaitan dengan persepsi masyarakat.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian.

### **1.9.6 Unit Analisa Data**

Unit Analisa Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pondokrejo serta Masyarakat Desa Pondokrejo yang berjumlah 95 orang.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

#### **1.9.7.1 Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data meliputi memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), pemberian nilai (*scoring*) dan proses pembeberan (*tabulation*).

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden mana yang relevan. Editing data merupakan proses pengoreksian dan pengecekan terhadap angket yang telah dijawab oleh responden apakah sudah dijawab secara lengkap atau belum, seandainya sudah dijawab apakah sudah benar. Seandainya ada angket yang rusak, maka angket tersebut harus disortir dan tidak diproses lebih lanjut dalam tahap pengolahan data. Dari 95 angket yang disebar, dalam penelitian ini tidak ada angket yang rusak. Artinya 95 angket dapat diolah.
- b. *Coding* yaitu pemberian data, simbol atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Maksudnya adalah angket yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti dapat diproses pada tahap pengolahan data lebih lanjut. Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam mengolah data, nama responden diinput berdasarkan nomer urut jumlah sampel yaitu noomor 1-95.
- c. *Scoring* yaitu memberi angka pada lembar jawaban angket tiap subyek skor dari tiap item atau pertanyaan pada angket ditentukan sesuai dengan perangkat pilihan (*option*). Pada tahap ini, kuesioner yang telah diisi oleh responden

dengan menggunakan tanda *checklis*, ketika diinput diubah menjadi angka untuk kemudian dapat dihitung berapa persentase dan juga frekuensinya.

- d. Tabulasi yaitu memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Pembuatan table dan memasukkan data hasil angket ke dalamnya sebagai persiapan analisis data melalui penerapan rumus statistik yang dipilih. Dalam penelitian ini tabel yang digunakan yaitu frekuensi (F) dan juga persentase (%).

### **1.9.7.2 Analisis Data**

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat kuantitatif, maka penulis menggunakan analisis statistic yaitu distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi komputer *SPSS 16.0 for windows*.